



**MODEL PERLINDUNGAN HUKUM SISTEM PERPARKIRAN  
UPN “VETERAN” JAWA TIMUR  
(Suatu Tinjauan Yuridis Empiris)**

Fauzul Aliwarman dan Wiwin Yulianingsih  
Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur

**ABSTRAK**

Penelitian mengenai model perlindungan hukum sistem perparkiran UPN “Veteran” Jawa Timur merupakan penelitian yang bersifat yuridis empiris. Tujuannya untuk mengetahui dan menguraikan perspektif perlindungan hukum terhadap para pihak akibat dari praktek perparkiran dan mengkaji model sistem perparkiran UPN “Veteran” Jawa Timur yang bertanggungjawab sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap para pihak.

Penelitian ini dilaksanakan di kampus UPN “Veteran” Jawa Timur melalui penelitian kepustakaan untuk mendapatkan data sekunder dan penelitian lapangan untuk mendapatkan data primer. Penentuan sampel dilakukan secara *purposive*. Responden terdiri dari 10 (sepuluh) pimpinan UPN “Veteran” Jawa Timur sebagai nara sumber. Data yang diperoleh, dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif. Selanjutnya, ditarik kesimpulan dengan menggunakan metode deduktif. Hasil penelitian ini bersifat deskriptif analitis.

Hasil penelitian menunjukkan, bahwa Implementasi sistim perparkiran di UPN “veteran” jawa Timur dilakukan berdasarkan hubungan langsung antara petugas parkir sebagai pihak pengelola perparkiran dengan konsumen. Perlindungan Hukum bagi konsumen perparkiran yang memanfaatkan layanan dan fasilitas parkir sama sekali tidak mendapat perlindungan dari manajemen universitas jika kendaraannya hilang. Meskipun telah diperjanjikan bahwa manajemen universitas tidak akan menanggung suatu apapun, namun ia tetap bertanggung jawab terkait akibat dari sesuatu perbuatan yang dilakukan olehnya karena segala perjanjian yang bertentangan dengan UU, kebiasaan dan kepatutan batal demi hukum. Model sistem perparkiran UPN “Veteran” Jawa Timur yang bertanggungjawab sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap para pihak adalah melalui sistem komputerisasi dengan Model Zona serta sarana prasana yang mendukung model sistem perparkiran.

**Kata kunci:** Model, Perlindungan Hukum, Perparkiran.

**I PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Tempat kerja maupun Kampus dituntut harus ramah terhadap perubahan kebutuhan hidup manusia sekarang. Ketersediaan lahan perparkiran yang luas dan aman serta kelancaran lalu lintas di kawasan kampus menjadi sebuah kebutuhan mendasar. Tidak hanya sampai di situ, semua fasilitas tadi harus ditunjang dengan manajemen pengelolaan perparkiran kampus (*Campus Transport Management*) yang handal, sehingga dapat menekan seminimal mungkin angka tindak kejahatan dan mengurangi waktu perjalanan yang pada akhirnya akan berujung pada kenyamanan dalam bekerja maupun kuliah.

Ketenangan kampus maupun tempat kerja bakal hilang tatkala mereka mengetahui mobil atau sepeda motornya yang diparkir hilang atau mengalami kerusakan. Belum lagi dampak psikologis ketakutan akan kehilangan dari pengguna jasa perparkiran lainnya. Dalam keadaan ini, muncul pertanyaan siapa pihak yang paling bertanggungjawab terhadap kehilangan atau kerusakan yang terjadi di tempat parkir yang sah dan resmi.

Penyelenggara perparkiran sebagai pihak yang pasti dituduh bertanggungjawab tidak serta merta dapat lepas tangan begitu saja. Apalagi perparkiran yang mengenakan tarif untuk setiap kali parkir. Hal ini disebabkan terdapat peraturan daerah yang mengatur masalah perparkiran



sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 2 ayat 1 Kepmendagri RI No.73 tahun 1999 bahwa kewenangan penyelenggaraan tempat parkir merupakan kewenangan daerah.

#### B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap para pihak akibat dari praktek perparkiran di UPN “Veteran” Jawa Timur?
2. Bagaimana bentuk manajemen perparkiran UPN “Veteran” Jawa Timur yang bertanggungjawab sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap para pihak?

## II TINJAUAN PUSTAKA

Perjanjian perparkiran sebagai bentuk perjanjian yang muncul dan berlaku dalam praktek masyarakat Indonesia, secara yuridis normatif tidak diatur dalam pranata hukum perjanjian atau perikatan yang terdapat dalam KUHPerdara. Perjanjian perparkiran yang dilakukan pengguna jasa parkir dipandang sebagai bentuk kesepakatan atau konsensus secara langsung yang dicapai antara para pihak. Pengguna jasa yang memasuki lahan parkir dengan izin dari pemilik lahan langsung meletakkan kendaraannya dengan atau tanpa pembayaran. Hal ini menandakan kedua belah pihak telah tercapai kata sepakat. Dengan kata lain, antara pengguna jasa parkir dan pemilik lahan telah terikat dalam suatu perjanjian dengan atau tanpa pembayaran karena adanya persesuaian kehendak dari para pihak yang merupakan sebab lahirnya perjanjian.

Bentuk kesepakatan dari perjanjian perparkiran dapat ditentukan secara bebas oleh para pihak. Hal ini berarti pihak pengguna parkir dan pemilik lahan dapat memilih apakah bentuk kesepakatan itu dilakukan secara lisan saja atau dituangkan dalam bentuk tertulis. Bentuk secara tertulis meliputi perjanjian di bawah tangan dan perjanjian yang merupakan akte otentik.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan, bahwa para pihak dapat melakukan perjanjian perparkiran dengan bebas dan perjanjian tersebut berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak. Perjanjian tersebut secara yuridis dianggap sah dan mengikat para pihak serta memiliki akibat hukum apabila salah satu pihak melakukan wanprestasi.

Perjanjian perparkiran berakhir ketika pemilik barang datang mengambil miliknya disertai dengan pembayaran atau tidak, maka pemilik lahan harus menyerahkan barang tersebut tanpa ada hak sedikitpun untuk menolak menyerahkan barang.

Belakangan praktek perjanjian perparkiran telah menggunakan karcis parkir dengan mencantumkan klausula eksonerasi yang menyatakan “segala kerusakan atau kehilangan kendaraan, peralatan dan lainnya selama berada di tempat atau pelataran perparkiran menjadi tanggungjawab pemilik kendaraan dan tidak ada penggantian berupa apapun.” Perjanjian perparkiran yang terjadi merupakan perjanjian dengan menyerahkan keamanan barang kepada pihak pemilik lahan, karena perjanjian perparkiran dianggap sudah terjadi hanya dengan menyerahkan barang dengan atau tanpa karcis parkir, maka klausula eksonerasi tersebut juga dianggap telah disetujui oleh pengguna jasa perparkiran.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka perparkiran mengandung unsur-unsur yang sama dengan bentuk penutupan perjanjian penitipan dan perjanjian sewa menyewa dalam KUHPerdara. Adapun bentuk pranata hukum perparkiran merupakan pranata perjanjian tidak bernama atau perjanjian jenis baru yang bersifat khusus (*contractus sui generis*). Dengan kata lain perjanjian ini timbul karena kebutuhan masyarakat yang belum diatur secara khusus dalam undang-undang serta belum diberi nama resmi (Satrio, 2001).



### III TUJUAN PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk:

1. Mengetahui dan menguraikan perspektif perlindungan hukum terhadap para pihak akibat dari praktek perparkiran di UPN “Veteran” Jawa Timur.
2. Mengkaji model sistem perparkiran UPN “Veteran” Jawa Timur yang bertanggungjawab sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap para pihak.

### IV METODE PENELITIAN

#### A. Sifat Penelitian

Penelitian mengenai Model Perlindungan Hukum Sistem Perparkiran UPN “Veteran” Jawa Timur ini adalah penelitian yang menggunakan pendekatan yuridis empiris, yaitu penelitian terhadap identifikasi hukum dan efektivitas hukum. Penelitian ini dilakukan dengan cara mengkaji dan mengolah data-data penelitian yang diperoleh secara langsung di lapangan, yang merupakan data primer atau disebut juga penelitian lapangan dengan bertitik tolak pada aspek hukum (yuridis). Untuk mendukung dan melengkapi data primer, juga dilakukan penelitian kepustakaan guna memperoleh data sekunder tentang permasalahan penelitian. Dengan demikian, data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

Laporan penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Deskriptif karena hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan atau melukiskan gambaran secara sistematis, terperinci dan menyeluruh mengenai Model Perlindungan Hukum Sistem Perparkiran UPN “Veteran” Jawa Timur. Analitis karena untuk selanjutnya akan dilakukan analisis guna menjawab beberapa permasalahan yang telah dirumuskan di atas.

#### B. Jenis Penelitian

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Oleh karena itu, cara yang ditempuh dalam penelitian ini dibedakan dua macam yaitu:

1. Penelitian kepustakaan (*legal research*)

Oleh karena penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris, maka penelitian ini lebih dititikberatkan pada penelitian lapangan, yang didukung atau diawali dengan penelitian kepustakaan (Soekanto, 1984: 52).

- a. Data penelitian

Data yang digunakan dalam penelitian kepustakaan adalah data sekunder, seperti peraturan perundang-undangan, berbagai literatur dan kamus.

- b. Bahan hukum, terdiri dari:

- 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat.
- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, meliputi buku-buku, makalah, berbagai hasil pertemuan ilmiah, berbagai hasil penelitian dan artikel yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.
- 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, meliputi:

- c. Sarana penelitian

Sarana yang digunakan dalam penelitian kepustakaan ini adalah studi dokumen atau bahan pustaka, yakni dengan mempelajari bahan-bahan yang merupakan data



sekunder, meliputi peraturan perundang-undangan, berbagai tulisan berupa buku, makalah dan artikel yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

2. Penelitian lapangan (*field research*)

Penelitian lapangan dibutuhkan guna mendukung *validitas* data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan.

a. Data penelitian

Data yang diperoleh dari penelitian lapangan adalah data primer, yaitu data yang langsung diperoleh dari responden dan informan di lokasi penelitian. Dalam penelitian ini data diperoleh dari Satuan Keamanan Kampus, Kepala Biro Umum, Wakil Dekan II se-UPN “Veteran” Jawa Timur.

b. Lokasi penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di wilayah Kampus UPN “Veteran” Jawa Timur, dengan dasar pertimbangan, bahwa seluruh kegiatan civitas akademika dari tujuh fakultas (termasuk pascasarjana) terpusat di kampus ini, sehingga dinilai dapat memberikan keterwakilan sampel yang cukup untuk sebuah hasil penelitian yang obyektif. Alasan lainnya, karena sampai penelitian ini dilakukan, belum pernah dilakukan penelitian yang terkait dengan isu penataan manajemen sistim perpustakaan UPN “Veteran” Jawa Timur yang masuk dalam jajaran 5 (lima) kampus unggulan di Jawa Timur.

c. Teknik pengambilan sampel

Teknik yang digunakan untuk menentukan responden dan informan adalah dengan metode *purposive sampling*, yaitu penentuan sampel yang dilakukan tidak secara *random* (*non random*), melainkan dengan kriteria dan pertimbangan tertentu oleh peneliti sesuai dengan permasalahan yang akan diteliti.

d. Subjek Penelitian

1) Responden

Responden dalam penelitian lapangan ini adalah mereka yang terlibat secara langsung dalam merasakan kemanfaatan ataupun ketidaknyamanan dari sistem perpustakaan.

2) Narasumber

Untuk melengkapi data yang diperoleh dari responden selanjutnya ditentukan narasumber, yaitu Wakil Rektor II, Kepala Biro Umum, Kepala Humas, Wakil Dekan II se-UPN “Veteran” Jawa Timur dan Ketua Pusbankum UPN serta kalangan Pakar Hukum dan Manajemen UPN “Veteran” Jawa Timur.

e. Alat pengambilan data

Alat pengambilan data yang digunakan dalam penelitian lapangan untuk memperoleh data primer adalah pedoman wawancara dan kuesioner. Pedoman wawancara digunakan untuk wawancara. Wawancara dilakukan dengan cara mengajukan pertanyaan secara lisan yang ditujukan kepada responden pemegang kebijakan dan (informan) narasumber berdasarkan pedoman wawancara yang sudah dipersiapkan terlebih dahulu dan dari pedoman wawancara tersebut dapat dikembangkan pertanyaan-pertanyaan tambahan untuk memperoleh keterangan atau informasi yang sifatnya menyeluruh. Pedoman wawancara tersebut dibedakan antara yang ditujukan untuk responden dan narasumber.

Kuesioner ditujukan kepada responden pemakai jasa dengan menggunakan bentuk tertutup. Kuesioner tertutup adalah salah satu bentuk kuesioner, di mana seluruh pilihan jawaban telah tersedia dalam daftar pertanyaan. Kemudian dilengkapi wawancara dengan menggunakan pedoman wawancara yang sudah dipersiapkan terlebih dahulu dan juga memperhatikan hasil kuesioner yang telah diperoleh sebelumnya. Hal ini dimaksudkan agar data yang diperoleh dari responden pemakai jasa lebih mendalam dan menyeluruh.



### C. Analisis Hasil Penelitian

Setelah data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan maupun penelitian lapangan sudah terkumpul lengkap, selanjutnya data diolah dan dianalisis secara kualitatif, yaitu dengan memperhatikan fakta yang betul-betul terjadi di lapangan, selanjutnya dibandingkan dengan data sekunder atau norma yang seharusnya berlaku, kemudian diambil kesimpulan dengan menggunakan metode berfikir deduktif, yaitu berdasarkan teori atau konsep yang bersifat umum (yang diaplikasikan) untuk menjelaskan hubungan sebuah data dengan data lainnya. Untuk selanjutnya hasil penelitian akan disusun dalam sebuah laporan akhir penelitian yang bersifat deskriptif, yaitu sebuah laporan yang memberikan gambaran yang sesungguhnya mengenai model perlindungan hukum sistem perparkiran UPN “Veteran” Jawa Timur.

## V. HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN

### A. Hasil Penelitian

Implementasi sistem perparkiran dilakukan berdasarkan hubungan langsung antara petugas parkir sebagai pihak pengelola perparkiran dengan konsumen. Dalam hal ini, petugas parkir akan mencatat nomor polisi setiap kendaraan roda dua dan empat yang akan masuk wilayah kampus pada selembar karcis khusus. Sebaliknya, pihak konsumen tinggal menentukan pilihan untuk menyetujui dengan cara menerima potongan karcis yang diberikan petugas dengan segala butir-butir ketentuannya atau balik haluan begitu saja sebagai bentuk ketidaksetujuannya terhadap sistem perparkiran. Selanjutnya, pihak konsumen masuk wilayah kampus dan menempatkan kendaraannya di lokasi yang berdekatan dengan tempat yang hendak ia tuju.

Pelaksanaan praktek sistem perparkiran yang dikelola oleh manajemen rektorat kampus UPN “Veteran” Jawa Timur secara garis besarnya dilakukan melalui tahapan-tahapan sebagai berikut:

- 1). Pihak konsumen yang hendak memasuki kampus berhenti di depan pos petugas parkir untuk menyatakan keinginannya memasuki kampus dengan cara menerima atau menolak potongan karcis.
- 2). Petugas parkir akan mencatat nomor polisi kendaraan konsumen untuk nantinya dicocokkan kembali dengan potongan karcis yang ada pada konsumen.

Bentuk persetujuan yang diberikan konsumen adalah dalam bentuk sikap menerima atau menolak. Sebagai bagian dari bentuk pelayanan kepada konsumen, petugas harus bertindak sigap dan cekatan sehingga pihak lain di belakangnya tidak menunggu lama. Apabila pihak konsumen menyatakan keberatan dan tidak setuju dengan cara berpaling dari memasuki kampus, maka transaksi tidak dapat terjadi.

Khusus hari Sabtu dan Minggu atau hari libur lainnya, pihak konsumen yang bukan dari kalangan civitas akademika atau masyarakat umum yang ingin memanfaatkan fasilitas kampus akan dikenakan biaya masuk sejumlah Rp.1000,00 (seribu rupiah) untuk sekali masuk.

- 3). Pihak konsumen menerima potongan karcis dengan segala butir-butir ketentuan yang ada di dalamnya secara penuh.

Setiap konsumen yang telah menerima potongan karcis dianggap telah setuju dengan semua syarat-syarat yang dimintakan oleh pihak manajemen universitas. Karcis parkir ini, pada dasarnya dibuat demi kepentingan pihak manajemen tanpa meminta kesepakatan konsumen terlebih dahulu. Konsumen dengan *bargaining position* yang tidak seimbang terpaksa harus menerima semua ketentuan yang sudah ditetapkan dalam karcis demi kepentingannya memasuki kampus. Dalam karcis tersebut, antara lain menerangkan mengenai:

- a). Logo manajemen kampus.
- b). Peruntukan parkir.
- c). Nomor Polisi Kendaraan konsumen.
- d). Nomor seri karcis
- e). Tanggal berlaku
- f). Butir ketentuan pertama “karcis jangan rusak atau hilang.”
- g). Butir kedua “karcis hilang / rusak agar menunjukkan KTP/SIM dan STNK asli.”
- h). Butir ketiga “dalam kasus kerusakan/kehilangan kendaraan bermotor UPN “Veteran” Jawa Timur tidak mengganti, tetapi berkewajiban mengusut sesuai dengan prosedur yang berlaku.”



- 4). Memarkir kendaraannya di lahan parkir yang telah disediakan.

Pihak konsumen dapat memarkir kendaraannya di lahan parkir mana saja berdasarkan tempat yang paling dekat dengan tujuannya. Pada dasarnya perjanjian ini baru dianggap terjadi dan sah mengikat para pihak, apabila di dalam perjanjian tersebut disertai dengan perbuatan nyata menerima karcis dan menyerahkan objek perjanjian dengan segala konsekuensinya.

- 5). Menyerahkan kembali potongan karcis parkir kepada petugas parkir.

Jika konsumen hendak meninggalkan kampus, maka ia harus melewati gerbang keluar yang telah dijaga para petugas parkir. Konsumen pada saat itu harus memperlihatkan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) kendaraannya dan menyerahkan potongan karcis masuk. Hal ini dipersyaratkan sebagai bentuk kehati-hatian agar tidak terjadi tindakan yang merugikan pihak manajemen.

Dalam prakteknya jika potongan karcis parkir hilang, pihak konsumen diminta untuk menghadap petugas keamanan yang ada di pos satpam. Pihak manajemen akan meminta sejumlah keterangan dan meminta fotocopi KTP atau SIM yang masih berlaku. Salinan tersebut dijadikan barang bukti yang bersangkutan menghilangkan karcis parkir. Dengan begitu, pihak konsumen bisa meninggalkan kampus dengan mengendarai kendaraannya dengan leluasa.

## B. Pembahasan

1. Perlindungan hukum terhadap para pihak akibat dari praktek perparkiran di UPN “Veteran” Jawa Timur?

- a. Perlindungan Hukum Bagi Konsumen (Pengguna/ Penyewa) Lahan Parkir di UPN “Veteran” Jawa Timur

Perjanjian perparkiran yang dilakukan pengguna jasa parkir dipandang sebagai bentuk kesepakatan atau konsensus secara langsung yang dicapai antara para pihak. Pengguna jasa yang memasuki lahan parkir dengan izin dari pemilik lahan langsung meletakkan kendaraannya dengan atau tanpa pembayaran. Hal ini menandakan kedua belah pihak telah tercapai kata sepakat. Dengan kata lain, antara pengguna jasa parkir dan pemilik lahan telah terikat dalam suatu perjanjian dengan atau tanpa pembayaran karena adanya persesuaian kehendak dari para pihak yang merupakan sebab lahirnya perjanjian.

Penyerahan barang dalam kekuasaan pemilik lahan berlaku sebagai tanda kesepakatan pihak pengguna jasa dari suatu perjanjian perparkiran dengan pihak pemilik lahan. Prestasi para pihak yang sudah diperjanjikan tersebut, harus dijaga. Setelah barang diserahkan dan diterima oleh pihak lain, maka para pihak telah mengikatkan dirinya secara timbal balik. Dengan begitu, kedua belah pihak mempunyai hak dan kewajiban untuk memenuhi perjanjian yang telah disepakati.

Konsumen (pemilik kendaraan) yang memarkirkan kendaraannya sama sekali tidak mendapat perlindungan dari Pelaku Usaha (pengelola parkir) jika kendaraannya hilang. Sebenarnya, dengan mengacu pada ketentuan Pasal 1336 jo. Pasal 1367 KUHPer yaitu tentang tanggung jawab atas kerugian orang lain baik akibat dari perbuatan dia sendiri (pelaku usaha) atau karena kelalaiannya maupun perbuatan dari orang-orang yang menjadi tanggungannya dan barang-barang yang berada dalam pengawasannya. Selain itu, juga mengacu pada Pasal 4 UUPK mengenai hak-hak konsumen yang diantaranya adalah hak atas keamanan dan keselamatan dalam pemakaian barang dan/ atau jasa juga hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/ atau penggantian.

Seharusnya pelaku usaha (pengelola parkir) berkewajiban untuk memberikan pengamanan atas kendaraan bermotor milik konsumennya sebagai pengguna jasa penyedia perparkiran. Namun, yang terjadi kemudian adalah pihak pengelola berdalih bahwa ia (pengelola parkir) tidak bertanggung jawab atas segala kehilangan yang terjadi pada setiap kendaraan pengguna jasanya.

- b. Perlindungan Hukum bagi Pengelola Parkir (Institusi UPN “Veteran” Jawa Timur)



Tempat kerja maupun Kampus dituntut harus ramah terhadap perubahan kebutuhan hidup manusia sekarang. Ketersediaan lahan parkir yang luas dan aman serta kelancaran lalu lintas di kawasan kampus menjadi sebuah kebutuhan mendasar. Tidak hanya sampai di situ, semua fasilitas tadi harus ditunjang dengan manajemen pengelolaan parkir kampus (*Campus Transport Management*) yang handal, sehingga dapat menekan seminimal mungkin angka tindak kejahatan dan mengurangi waktu perjalanan yang pada akhirnya akan berujung pada kenyamanan dalam bekerja maupun kuliah.

Pelaku usaha (pengelola parkir) yang dalam hal ini adalah UPN “Veteran” Jawa Timur juga berhak mendapatkan perlindungan hukum guna menciptakan kenyamanan berusaha dan sebagai keseimbangan atas hak-hak yang diberikan kepada konsumen. Meskipun konsumen berada pada posisi *take it or leave it*, klausula baku yang dibuat oleh Pengelola Parkir diharapkan tetap memenuhi asas-asas lain dalam perjanjian seperti asas keseimbangan yang merupakan asas yang menghendaki kedua belah pihak memenuhi dan melaksanakan perjanjian dan konsumen (pengguna lahan parkir) dalam pelaksanaan perjanjian harus mempunyai itikad baik, asas kepatutan, asas konsensualisme (persesuaian kehendak) yang timbulnya berdasarkan perjumpaan atau persesuaian kehendak, asas itikad baik dan tidak ada cacat tersembunyi.

Asas-asas tersebut dapat dipakai oleh Pelaku Usaha (Pengelola Parkir) untuk mendapatkan suatu bentuk perlindungan hukum. Selain itu, Pelaku Usaha (Pengelola Parkir) dapat berlindung pada ketentuan Pasal 5 UUPK mengenai kewajiban konsumen dan Pasal 6 UUPK mengenai hak Pelaku Usaha.

Klausula baku yang terdapat dalam karcis parkir merupakan bentuk dari pengertian Klausula baku dalam UUPK yang merupakan *lex specialist* dari pengaturan umum yang ada pada perikatan dalam KUHPer Pasal 1493 yang isinya adalah:

Kedua belah pihak diperbolehkan dengan persetujuan-persetujuan istimewa, memperluas atau mengurangi kewajiban yang ditetapkan oleh undang-undang ini; bahkan mereka itu diperbolehkan mengadakan perjanjian bahwa si penjual tidak akan diwajibkan menanggung sesuatu apapun.

Akan tetapi, kewajiban pelaku usaha untuk bertanggung jawab tetap ditegaskan dalam pasal 1494 KUHPer, meski dalam Pasal 1493 KUHPer diperbolehkan bahwa dengan perjanjian pelaku usaha tidak diwajibkan menanggung sesuatu apapun.

2. Model sistem parkir UPN “Veteran” Jawa Timur yang bertanggungjawab sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap para pihak.

Kampus memiliki kegiatan manajemen, baik yang berkaitan dengan sumber daya manusia, keuangan, dan juga kegiatan. Jumlah dan perubahan data yang berlangsung secara rutin atau tak tentu memerlukan pengelolaan. Meningkatnya penggunaan kendaraan pribadi ke kampus, baik mobil atau motor sebagai modal transportasi menuju kampus seiring dengan peningkatan jumlah mahasiswa baru setiap tahun berdampak terhadap penyediaan lahan parkir dan kelancaran lalu – lintas di dalam dan sekitar kampus UPN “Veteran” Jawa Timur.

Sarana parkir merupakan kebutuhan publik yang sudah seharusnya mendapat perhatian khusus dari pengelola lahan parkir. Sebuah sarana parkir yang terpercaya akan memiliki prestise tersendiri dan akan memberi kenyamanan bagi pengguna lahan parkir untuk menitipkan kendaraan mereka di dalam area parkir. Suatu sistem parkir tidak hanya merupakan alat bantu pencatatan dan perhitungan biaya saja, salah satu aspek terpenting bagi publik pengguna sarana parkir adalah aspek keamanan kendaraan dari resiko pencurian di area parkir pengelola, dengan semakin besarnya kapasitas parkir itu sendiri, aspek keamanan tidak mungkin hanya dengan mengandalkan petugas keamanan, melainkan perlu untuk mengembangkan suatu sistem komputerisasi dengan tingkat keamanan yang sangat tinggi.



Kemajuan teknologi ditandai dengan kemajuan sosial dan kebutuhan pembangunan sosial. Model Sistem Perparkiran yang baik harus bisa mengakomodir segala sesuatu yang menyangkut kebutuhan Pengguna lahan parkir. Mulai dari kenyamanan hingga keamanan kendaraan mereka.

Model sistem perparkiran yang dapat dipakai di kampus UPN “Veteran” Jawa Timur adalah Model Zona serta sarana prasana yang mendukung model sistem perparkiran.

Mode Zona dipergunakan untuk mengatur area-area parkir dengan memisahkan antara pengguna jasa parkir VIP, langganan jasa parkir dan *casual parking*. Artinya ada beberapa pengelompokan dalam Model Zona, yaitu:

1. Pengelompokan Zona VIP;
2. Zona umum/ Casual;
3. Zona Reserve/ Vallet. ([www.line-parking.com](http://www.line-parking.com), 01 Nopember 2010, pukul. 11.00 WIB).

### DAFTAR PUSTAKA

#### A. Buku

- Badrulzaman, Mariam Darus, 1983, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata; Buku III tentang Hukum Perikatan dengan Penjelasan*, Alumni, Bandung.
- \_\_\_\_\_, 1994, *Aneka Hukum Bisnis*, Alumni, Bandung.
- Fuady, Munir, 1994, *Hukum Bisnis dalam Teori dan Praktek*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- Hatta, Sri Gambir Melati, 1999, *Beli Sewa Sebagai Perjanjian Tak Bernama; Pandangan Masyarakat dan Sikap MA*, Alumni, Bandung.
- Miru, Ahmadi dan Sutarman Yodo, 2004, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Prodjodikoro, Wirjono, 1981, *Azas-azas Hukum Perjanjian*, PT. Bale Bandung, Jakarta.
- Satrio, J., 1992, *Hukum Perjanjian*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- \_\_\_\_\_, 2001, *Hukum Perikatan; Perikatan yang Lahir dari Perjanjian-Buku I*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Sidharta, 2000, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, PT. Grasindo, Jakarta.
- Sjahdeni, Sutan Remi, 1993, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*, Institut Bankir Indonesia, Jakarta.
- Soerjatin, R, 1981, *Hukum Ikatan*, Pradya Paramita, Jakarta.
- Subekti, R., 1995, *Aneka Perjanjian*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Widjaja, Gunawan, Kartini Muljadi, 2003, *Serial Hukum Perikatan; Jual Beli*, Rajawali Pers, Jakarta.

#### B. Makalah

- Badrulzaman, Mariam Darus, 1980, *Perjanjian Buku (standar) Perkembangannya di Indonesia*, Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar pada Fakultas Hukum USU, tanggal 30 Agustus 1980.
- Sudikno Mertokusumo, 1990, *Perkembangan Hukum Perjanjian*, Makalah Seminar Nasional Asosiasi Pengajar Hukum Perdata/Dagang, Yogyakarta.
- \_\_\_\_\_, 1992, *Catatan Kapita Selektu Hukum Perjanjian*, Makalah Penataran Dosen Hukum Perdata/Dagang, Yogyakarta.

#### C. Peraturan Perundang-undangan

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK).
- Keputusan Menteri Perhubungan No.66 tahun 1993 tentang Fasilitas Parkir untuk Umum
- Keputusan Menteri Dalam Negeri No.73 tahun 1999 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perparkiran di Daerah.
- Perda Kota Surabaya No.1 tahun 2009 tentang penyelenggaraan Perparkiran dan Retribusi Parkir.





SEMINAR HASIL PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT YANG DIDANAI  
DP2M DIKTI, RISTEK, KKP3T, KPDT, PEMDA DAN UPN/VJ TAHUN 2010  
Surabaya, 15 – 16 Desember 2010  
Diselenggarakan Oleh LPPM – UPN “Veteran” Jawa ISBN : 978-602-98517-2-4

**D. Internet**

<http://www.hukumonline.co.id/3D/Berita+kasus+perparkiran&cd-a> diakses 5 Desember 2009 13:30.

[http://www.tempointeraktif.com/hg/nasional/2008/05/09/brk,20080509-22776\\_id.html](http://www.tempointeraktif.com/hg/nasional/2008/05/09/brk,20080509-22776_id.html) diakses 5 Desember 2009 13:05.

<http://hukumonline.co.id/detail.asp3D/Berita+Citizen+Law+Suit+Dipakai+Menggugat+Perda+Perparkiran&cd-a> diakses 5 Desember 2009 14:00.

**E. Kamus**

Partanto, Pius A., M. Dahlan Al Barry, 1994, *Kamus Ilmiah Populer*, Arkola, Surabaya.  
Simorangkir, JCT, dkk, 2002, *Kamus Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1990, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta